

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	1	9
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :

Halaman : **pa 5**

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabungan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

# Pengelola Keuangan Wajib Ganti Rugi

**PALANGKA RAYA**-Kelalaian dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Apabila negara mengalami kerugian, maka penge-

lola wajib mengganti rugi. Hal tersebut menjadi topik pembicaraan dalam focus group discussion (FGD) penanggulangan kerugian negara, yang dilaksanakan di aula BPK RI Kalteng, Jalan Yos Sudarso, Kamis (8/8). Diskusi tersebut dihadiri Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, persoalan menyangkut kerugian negara merupakan kasus yang juga dihadapi di Kalteng. Dikatakannya, kerugian negara itu meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pejabat negara dan PNS bukan bendahara, yang diketahui melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya.

► Baca: *Pengelola ... Hlm 5*

## ■ PENGELOLA ...

(Sambungan dari hlm 1)

"Sehingga diwajibkan untuk menggantikan kerugian," katanya, kemarin.

Sekda pun menambahkan, siapa saja yang diberi wewenang untuk menerima dan menyimpan serta membayar atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik negara, harus bertanggung jawab secara pribadi atas semua kerugian yang terjadi.

Ganti rugi tersebut dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.

"Kasus kerugian negara tetap akan dilimpahkan kepada ahli waris jika yang bersangkutan meninggal dunia," ungkap mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng itu.

Saat ini Kalteng sedang berupaya

menyelesaikan permasalahan kerugian negara, baik terkait tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi. Ini merupakan komitmen gubernur untuk menyelesaikan masalah kerugian keuangan negara.

"Semoga dengan dilaksanakan forum diskusi ini dapat menambah wawasan dalam hal penyelesaian kerugian negara, sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa hambatan," harapnya. (nue/ce/abe)